

ABSTRAK

Melimpahnya sumber daya perikanan di perairan laut Indonesia ternyata telah menarik perhatian pihak asing untuk juga dapat menikmatinya secara ilegal melalui kegiatan *illegal fishing* tindakan *illegal fishing* tidak hanya merugikan secara ekonomi dengan nilai triliunan rupiah yang hilang, tetapi juga menghancurkan perekonomian nelayan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui konstruksi pengaturan hukum tentang Penenggelaman Kapal Pelaku *Illegal Fishing* dalam Hukum Nasional dan Internasional dan mengkaji dampak dari pengaturan Hukum tentang Penenggelaman Kapal Pelaku *Illegal Fishing* di Indonesia.

Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah: 1) Bagaimana pengaturan Hukum Internasional tentang Penenggelaman Kapal Pelaku *Illegal Fishing*, 2) Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya pengaturan Hukum tentang Penenggelaman Kapal Pelaku *Illegal Fishing*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yaitu yuridis normatif, yang dilakukan dengan suatu penelitian yang secara deduktif, dimulai dengan analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur.

Hasil dari penelitian yang penulis laksanakan menunjukkan bahwa: 1) Kebijakan Penenggelaman Kapal Pelaku *Illegal Fishing* oleh Pemerintah Indonesia tercantum dalam UU Perikanan yang meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982). 2) Kebijakan Penenggelaman Kapal Pelaku *Illegal Fishing* di Indonesia menimbulkan dampak negatif, berupa pencemaran laut, kerusakan lingkungan dan gangguan jalur pelayaran yang ditimbulkan dari bangkai kapal yang telah dieksekusi tersebut. Disisi lain dampak positif dari kebijakan tersebut adalah peningkatan perekonomian negara, peningkatan NTN dan lahirnya MoU yang khusus membahas mengenai *illegal fishing*.

Kata Kunci: *Illegal Fishing*, Kapal Asing, Penenggelaman.

ABSTRACT

The abundance of fisheries resources in the Indonesian sea water turned out to have attracted the attention of foreign parties to also enjoy it illegally through illegal fishing activities, illegal fishing actions not only hurt economically with trillions of rupiah lost, but also destroyed the fishermen's economy. The purpose of this paper is to investigate the construction of legal arrangements regarding the Immersion of Illegal Fishing Vessels in National and International Law and examine the impact of legal arrangements regarding the Immersion of Illegal Fishing Vessels in Indonesia.

The formulation of the issues raised by the author are: 1) How are the international legal arrangements regarding the sinking of Illegal Fishing Vessels, 2) What is the impact arising from the existence of legal arrangements regarding the sinking of Illegal Fishing Vessels.

The research method used in this paper uses the method of using normative legal approach, which is carried out with a deductive study, starting with an analysis of the articles in the legislation that governs.

The results of the research that the author conducted showed that: 1) The sinking policy of Illegal Fishing Vessels by the Indonesian Government is contained in the Fisheries Act which ratified the 1982 Sea Law Convention (UNCLOS 1982). 2) Illegal Fishing Vessel Sinking Policy in Indonesia has a negative impact, in the form of sea pollution, environmental damage and disruption of shipping lines caused by the shipwreck that has been executed. On the other hand the positive impact of the policy is an increase in the country's economy, an increase in NTN and the birth of an MoU that specifically addresses illegal fishing.

Keywords: Illegal Fishing, Foreign Vessels, Drowning.